

# Analysis of Efficiency and Effectiveness of Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget at Bpkad Surabaya

Natasya Putri Aprillia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

[pnatasya010@gmail.com](mailto:pnatasya010@gmail.com)

Dra. Ec. Sari Andayani, M.Aks, CMA

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

[sariandayani.ak@upnjatim.ac.id](mailto:sariandayani.ak@upnjatim.ac.id)

## Keywords:

Financial Performance, Financial Ratios, Budget Realization Report

## Abstract

*The purpose of this study was to analyze and determine the level of quality of local government financial performance as measured by the ratio analysis of the efficiency of regional spending and the effectiveness of regional income on the realization of the Surabaya City Budget. This research uses descriptive quantitative research. The data used in this realization research is secondary data in the form of 2017-2020 regional budget income and expenditure reports obtained from Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya, using the financial ratio analysis method of regional expenditure efficiency and the effectiveness of local revenue. The results show that the financial performance of the Surabaya City Government at the level of regional expenditure efficiency during the 2017-2020 fiscal year period with criteria is quite efficient, because the management of the regional budget does not exceed 100%. The financial performance of the Surabaya City Government at the level of effectiveness of local revenue during the 2017-2020 fiscal year period with very effective criteria, where the percentage of the effectiveness ratio is above 100% on average.*

## Kata Kunci

Kinerja keuangan, Rasio keuangan, Laporan Realisasi Anggaran

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menentukan tingkat kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan analisis rasio efisiensi belanja daerah dan efektivitas pendapatan asli daerah terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode anggaran 2017-2020 yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Menggunakan metode analisis rasio keuangan efisiensi belanja daerah dan efektivitas pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tingkat efisiensi belanja daerah selama periode tahun anggaran 2017-2020 dengan kriteria cukup efisien, karena pada pengelolaan anggaran daerahnya tidak melebihi 100%. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tingkat efektivitas pendapatan asli daerah selama periode tahun anggaran 2017-2020 dengan kriteria sangat efektif, yang mana presentase rasio efektivitasnya rata-rata diatas 100%.

## 1. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan guna melihat bagaimana suatu perusahaan tersebut dapat melakukan segala aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pada kinerja suatu perusahaan menggambarkan perihal kondisi-kondisi keuangan pada suatu perusahaan/instansi yang dapat dianalisa menggunakan alat analisis keuangan yang memberikan hasil mengenai baik atau buruknya keadaan

keuangan suatu perusahaan, yang dapat menggambarkan hasil kinerja dalam periode tertentu. Maka dari itu, sumber daya menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi perubahan lingkungan secara optimal (Fahmi, 2018:142). Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam melaporkan segala laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan guna mensejahterahkan masyarakat secara transparan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik menjadi



peran penting untuk menilai bagaimana kinerja organisasi tersebut, apakah sudah efisien dan efektif. Pengukuran kinerja ini menggunakan konsep pendekatan *value for money* sebagai jembatan guna mengetahui kinerja organisasi sektor public (Mahsun:2006).

Untuk menilai pencapaian suatu tujuan organisasi, efektivitas menjadi tolak ukur dalam mewujudkannya, jika pada suatu organisasi tersebut dapat mewujudkan hasil yang telah direncanakan maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan rencana yang dijalankannya. Dalam indikator *value for money*, efisiensi merupakan pokok penting yang dimana efisiensi tersebut diukur dengan menggunakan rasio-rasio perbandingan *output* dan *input*. Jika *output* lebih tinggi dibanding *input* maka dari itu dapat diartikan bahwa semakin tinggi pula tingkat efisiensi pada organisasi.

Dalam keberhasilan pada suatu pemerintahan, dapat ditinjau dari ukuran kinerja yang telah diraihinya. Dengan menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah dilakukan dengan cara mengukur kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran yang didalamnya dapat menunjukkan perbandingan suatu anggaran dengan realisasinya dalam tiap periode pelaporan. Didalam Laporan Realisasi Anggaran terdapat informasi yang bermanfaat dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang diterima guna mendanai suatu kegiatan pemerintahan daerah pada periode mendatang melalui cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling utama. Anggaran dalam suatu organisasi menjadi peran penting sebagai alat alokasi, distribusi dan stabilitas sumber daya publik, pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu, pengukuran tingkat efisien dan efektif laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah

daerah dalam memanfaatkan anggaran keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kota Surabaya, pemerintah daerah telah melakukan otonomi daerah yang diberikan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengelola anggaran pemerintah daerah serta motivasi penulis dalam meneliti ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemerintah Kota Surabaya telah melakukan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efisien dan efektif.

Berbagai penelitian terdahulu tentang kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain yang dilakukan oleh (Dien, 2015) menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berpengaruh pada efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran keuangan. Hal ini mengartikan bahwa semakin efisien dan efektifnya dalam penggunaan anggaran dan belanja daerah, maka semakin tinggi peningkatan dalam kinerja keuangan daerah, hal ini juga sejalan dengan penelitian (Rosyidah dkk, 2020), (Teguh dkk, 2016).

Fenomena atau permasalahan yang sering terjadi pada unit kerja pemerintahan daerah adalah serapan anggaran yang kurang ideal, berdasarkan dari sisi pandang efektivitas pemerintah daerah pada umumnya belum melakukan eksekusi dalam kegiatannya yang sesuai dengan skala prioritas dari tolak ukur yang dibutuhkan sesuai kebutuhan serta tuntutan rakyat. Maka dari itu, untuk melihat seberapa jauh tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan indikator *value for money* secara ekonomis, efisien serta efektif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masa yang akan datang bersifat transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan keadilan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Value For Money*

Menurut Muindro Renyowijoyo (2012:04) dalam menjalankan organisasi sektor publik

dapat memperhatikan tuntutan baru dalam transparansi dan akuntabilitas yang menganut *value for money* dalam aktivitasnya. *Value for money* ini ialah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didalamnya terdiri atas tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektif.

Efisien dalam *value for money* merupakan hasil pencapaian suatu output yang dihitung maksimum dengan penggunaan masukan minimum untuk mencapai target dalam keluaran maupun masukan yang berkesinambungan dengan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar kinerja yang telah direncanakan.

Efektif dalam *value for money* merupakan tingkat perolehan dari kegiatan atau program dengan target yang telah ditetapkan secara alamiah, efektif merupakan suatu perbandingan antara *output* dan *outcome*. Ekonomi, efisien dan efektif merupakan elemen pokok *value for money*, namun terdapat dua elemen tambahan yang meliputi keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*). Pada keadilan ini mencakup adanya kesempatan sosial untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan suatu pelayanan publik yang bermutu. Penggunaan suatu keuangan publik tidak hanya fokus pada kelompok tertentu, melainkan dilakukan secara merata. Maka dari itu, tidak hanya keadilan yang dilakukan, perlu dilakukan pula distribusi secara merata (*equality*).

## 2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, 2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kerangka keuangan tahunan daerah atas dasar kesepakatan DPRD dengan pemerintah yang dapat menjelaskan sumber pendapatan daerah, memperhitungkan alokasi pengeluaran untuk melakukan suatu kegiatan yang direncanakan serta biaya yang dapat menunjukkan terjadinya surplus atau defisit.

## 2.3 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Erlina Rasdianto (2013:23) di dalam laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, serta pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang dapat membandingkan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang mencakup didalamnya terdiri dari belanja, transfer, pembiayaan dan pendapatan-LRA.

## 2.4 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya menjelaskan kinerja merupakan hasil dari suatu program yang telah dicapai yang berkesinambungan dengan penggunaan suatu anggaran dengan lingkupan kuantitas serta kualitas yang terukur. Kinerja keuangan adalah pengukuran dari suatu pengelolaan anggaran organisasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Halim dan Kusufi (2012:43) keuangan daerah merupakan suatu proses dalam pengukuran, pengidentifikasian serta pelaporan dalam transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang meliputi Kota, Kabupaten maupun Provinsi.

## 3. METODE PENELITIAN

Dalam mendapatkan informasi dan data dari masalah yang diangkat oleh penulis, penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kota Surabaya periode tahun 2017 sampai dengan 2020. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan data Dokumentasi yang didapatkan dari pencatatan data-data penting yang diperoleh dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.

Analisis data yang digunakan pada hal ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif yang menganalisis Rasio Efisiensi Belanja Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah untuk menguraikan apakah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya sudah mengelola anggaran secara efisien dan efektif sesuai dengan skala prioritas dan tolak ukur yang dibutuhkan sesuai kebutuhan masyarakat.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### a. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Pada variabel ini diukur dengan menggunakan skala rasio, yang satuan pengukurannya yaitu persen (%). Perhitungan rasio efisiensi belanja daerah dengan rumus:

Realisasi Belanja : Anggaran Belanja x 100%.

- 1) Tahun 2017 = Rp. 791.409.152.257,09 :  
Rp. 8.963.930.686.060,00 x 100% = 88,27%
- 2) Tahun 2018 = Rp. 8.176.929.496.298,63 :  
Rp. 9.268.450.333.673,00 x 100% = 88,22%
- 3) Tahun 2019 = Rp. 9.162.655.939.831,57 :  
Rp. 9.933.509.442.785,00 x 100% = 92,24%
- 4) Tahun 2020 = Rp. 8.032.680.988.065,47 :  
Rp. 9.044.328.840.921,00 x 100% = 88,81%

#### b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Pada variabel ini diukur dengan menggunakan skala rasio, yang satuan pengukurannya yaitu persen (%). Perhitungan rasio efisiensi belanja daerah dengan rumus:

Realisasi Penerimaan PAD : Target Penerimaan PAD x 100%.

- c. Tahun 2017 = Rp. 5.161.844.571.171,67 :  
Rp. 4.709.645.546.043,00 X 100% =  
109,60%
- d. Tahun 2018 = Rp. 4.973.031.004.727,10 :  
Rp. 4.758.967.236.960,00 x 100% =  
104,50%
- e. Tahun 2019 = Rp. 5.381.920.253.809,67 :  
Rp. 5.234.687.226.266,00 x 100% =  
102,81%
- f. Tahun 2020 = Rp. 4.289.960.292.372,98 :  
Rp. 5.035.094.239.075,00 x 100% =  
85,20%.

## 4.2 Pembahasan

### a. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Berdasarkan dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah, menunjukkan bahwa Kota Surabaya tahun 2017-2020 ini dalam kinerja pengelolaan keuangannya telah dilakukan dengan baik karena dalam realisasi belanja daerah tidak melebihi anggaran belanja yang telah ditetapkan senilai Rp. 7.912.409.152.257,09 pada tahun 2017, pada tahun 2018 dengan nominal Rp. 8.176.929.496.298,63, tahun 2019 Rp. Rp. 9.162.655.939.831,57 dan pada tahun 2020 Rp. Rp. 8.032.680.988.065,47.

Pada tahun 2017 realisasi belanja sebesar 88,27%. Tahun 2018 mengalami penurunan jumlah realisasi belanja menjadi 88,22%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan realisasi belanja sebesar 92,24%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah realisasi belanja menjadi 88,81%. Dari penjelasan yang telah dijabarkan, rasio efisiensi belanja daerah Kota tahun 2017-2020 dapat dikatakan cukup Surabaya pada efisien dan mengalami peningkatan walaupun ditahun 2020 penurunan, namun ditinjau dari rasio efisiensi secara keseluruhan konsisten dibawah 100%, hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya dalam mengelola anggaran belanja daerah dari tahun 2017-2020 memperbaiki kinerjanya yang telah melakukan efisiensi belanja daerah.

Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, hal tersebut diakibatkan pada tahun 2019 Kota Surabaya ini banyak mengalokasikan anggaran belanja keseluruhan untuk belanja modal senilai Rp. 846.000.000.000, yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien yang dilakukan upaya pemeliharaan atau rehabilitasi saluran drainase dan boezem di 1.339 lokasi, maka dari itu anggaran belanja daerah masih mengalami defisit yang mana disebabkan akibat pembengkakan dalam APBD karena munculnya anggaran lain yang sengaja disusupkan kedalam draf APBD. Secara keseluruhan dari tahun 2017-2020 Kota Surabaya dalam mengelola anggaran

daerahnya dapat dikatakan cukup efisien ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada efisiensi belanja daerah yang mengindikasikan telah dilakukan pemerintah untuk perbaikan kinerjanya.

#### **b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa Kota Surabaya tahun 2017-2020 ini dalam kinerja pengelolaan keuangannya telah dilakukan dengan baik karena tingkat efektivitasnya melebihi 100% yang mana target anggarannya tepat dalam mengelola anggaran Kota Surabaya yang dapat dikatakan sangat efektif. Selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 anggaran Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan semakin meningkat dengan nilai tertinggi pada tahun 2017 yang terjadi sebesar 109,60% yang mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan presentase 104,50%. Kemudian pada tahun selanjutnya mengalami penurunan 1,69% dengan presentase 102,81% ditahun 2019. Begitupula tahun setelahnya, presentase terendah yang terjadi pada tahun 2020 dengan presentase 85,20% dengan penurunan 17,61%. Walaupun dalam grafik tersebut mengalami kenaikan dan penurunan, nilai efektivitas pengelolaan anggaran pada Kota Surabaya ini selama 4 tahun periode anggaran nilai efektivitas dalam hasil presentase menunjukkan diatas 100% yang mana sangat efektif.

Kota Surabaya berhasil meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah, yang mana mampu dalam mengelola daerahnya untuk meningkatkan sumber pendapatannya dan mengindikasikan bahwa Kota Surabaya ini sudah dikatakan independen. Dan secara keseluruhan bahwa Kota Surabaya ini terbukti dalam mengelola anggaran daerahnya sangat efektif serta secara tidak langsung perekonomian dalam daerah juga akan meningkat.

## **5 PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Hasil penelitian dan analisis perihal kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya yang diukur menggunakan rasio keuangan efisiensi belanja daerah dan efektivitas pendapatan asli daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tingkat efisiensi belanja daerah selama periode tahun anggaran 2017-2020 dengan kriteria cukup efisien, karena pada pengelolaan anggaran daerahnya tidak melebihi 100%.
- Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tingkat efektivitas pendapatan asli daerah selama periode tahun anggaran 2017-2020 dengan kriteria sangat efektif, yang mana presentase rasio efektivitasnya rata-rata diatas 100%.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

#### **a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya**

Pada pemerintah daerah kota surabaya sebaiknya dapat bisa menggali dan mengembangkan potensi daerahnya guna mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat yang mana hal tersebut dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Serta agar dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya, maka sebaiknya dilakukan untuk memperluas pada alokasi belanja modal yang sesuai dengan layanan publik penyediaan sarana prasarana ekonomi.

#### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penambahan pada metode analisis yang tidak hanya berkonsep pada *value for money* dan lebih bervariasi guna menganalisis dan menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih rinci menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Stanley, W. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534-541.
- Erlina Rasdianto. 2013. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua. Medan: Brama Ardian.
- Fahmi, Irham. 2018. Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2007). In *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusufi, A. H. (2011). In *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nuryaman. Christina, V. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktek*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pp No.105 Tahun 2000.
- Rahmawati, T. E. (2016). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK REKLAME, PAJAK PARKIR, PAJAK HIBURAN, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1*.
- Renyowijoyo, M. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan. UU No. 33 Tahun 2004, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Rosyidah, N., & Santoso, S. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015-2019. *Surakarta Accounting Review*, 2(2), 1-7. Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Teguh Erawati, N. R. (Juni 2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1*.
- Tenda, V.S. Mirki, H. Sabijono., V.Z. Tirayoh. 2014. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010-2012. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.1
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 17 Pasal 32 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 51 ayat (3) Tentang Pemerintah Daerah
- Widarta (2010:2). Otonomi Daerah Bermakna Kebebasan Dan Kemandirian Daerah Dalam Penentuan Langkah-Langkah Sendiri. Bandung.
- Widjajanta, B., Widyaningsih, A., & Tanuatmodjo, H. (2014). *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, 20-22. CV Citra Praya.